

## **Tak Berpengaruh ke Program Gratispol Rudy - Seno**

**MUNCULNYA** kebijakan efisiensi anggaran 2025 membuat banyaknya pertanyaan publik terhadap realisasi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Terpilih Rudy Mas'ud – Seno Aji.

Lantas bagaimana efeknya terhadap keberlanjutan program andalan Gratispol yang jadi jargon fenomenal hingga meyakinkan rakyat Kaltim hingga membuat Rudy-Seno memenangi kontestasi Pilgub 2024?

Juru Bicara Gubernur dan Wagub Terpilih Sudarno menegaskan, program Gratispol akan tetap menjadi prioritas pertama setelah Rudy-Seno dilantik. Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Terpilih yang diketuai Rusmadi Wongso disebutkan tengah berupaya mewujudkan sejumlah program yang sudah disusun untuk diwujudkan.

“Yang pertama komitmen Rudy-Seno dalam Program Gratispol Tahun 2025 adalah pendidikan. Di mana secara bertahap akan direalisasikan untuk SPP gratis ke siswa SMA/SMK/MA, baik negeri dan swasta,” ungkap Sudarno kepada Kaltim Post, Sabtu (15/2).

Selanjutnya, dilaksanakan pembagian seragam gratis yang menasar siswa baru SMA/SMK/MA. Pembagian itu akan dilakukan secara bertahap. Kemudian Gratispol untuk marbot atau penjaga/pengurus rumah ibadah juga akan dilakukan bertahap tahun ini.

Bertahap itu, kata Sudarno, akan menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan anggaran dari Rudy-Seno. Mengingat, untuk APBD 2025 yang telah diketuk palu merupakan kebijakan antara DPRD Kaltim periode sebelumnya dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.

“Tim Transisi hingga saat ini masih terus menjadi pembahasan intensif. Di tengah adanya rasionalisasi anggaran, termasuk akselerasi anggaran juga tengah dibahas antara Tim Transisi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kaltim. Atas arahan Gubernur-Wagub Rudy-Seno dan didukung penuh oleh Pj Gubernur Akmal Malik,” sebutnya.

Mantan anggota DPRD Kaltim itu menegaskan, tersedianya anggaran untuk Program Gratispol Pendidikan dan Marbot tersebut tidak akan menyentuh pada tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN).

“Dari mana posnya, itu masih dibahas intensif. Yang jelas tidak mengganggu apa yang menjadi hak pegawai negeri. Saya pastikan, Rudy-Seno di tengah rasionalisasi ini tetap mewujudkan Gratispol. Karena ini sudah jadi komitmen gubernur-wakil gubernur,” tegas Sudarno.

## **PASER TERPANGKAS**

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat juga sampai ke daerah. Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan sektor yang pasti dipangkas adalah perjalanan dinas sebanyak 50 persen, belanja ATK, seminar, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang dianggap belum prioritas.

"Untuk detailnya saya belum ingat apa saja. Yang jelas kami akan mengikuti arahan pemerintah pusat dan ada surat edaran dari daerah apa saja yang dipangkas," kata Fahmi di sela kegiatan peninjauan infrastruktur, Kamis (13/2).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Paser Rusdian Nor menambahkan, ada Dana Alokasi Umum (DAU) Paser yang terdampak pemotongan transfer pusat ke daerah. Apa saja *itemnya*, itu akan ditentukan oleh TAPD Paser. Dalam waktu dekat TAPD Paser akan segera menggelar rapat. Rusdian mengatakan belum bisa menjelaskan apa saja belanja yang terpangkas dari DAU tersebut. **(rd)**

Sumber Berita :

1. [kaltimpost.co.id](http://kaltimpost.co.id), Tak Berpengaruh ke Program Gratispol Rudy - Seno, 16/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

